

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. TEORI KEAGENAN

Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya diekplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksposisi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling (1976) menyebut suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham sebagai “prinsipal”. Pemegang saham mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Namun pada kenyataannya, agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan prinsipal.

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi.

2.2. HUBUNGAN KEAGENAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN

Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan sangat kompleks, tidak seperti pada perusahaan nonbank. Perusahaan perbankan diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh BI. Adanya berbagai regulasi tersebut disebabkan karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit spending unit*). Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar. Ketidakmampuan untuk menjaga *image* (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank (Rahmawati *et al.* 2007).

Menurut Taswan (2010), pada perusahaan perbankan terdapat hubungan pemegang saham dengan manajemen (agen), hubungan bank (pemegang saham) dengan debitur, dan hubungan bank dengan regulator. Hubungan bank dengan regulator tidak akan dijumpai dalam perusahaan nonbank. Hubungan-hubungan tersebut mampu menjelaskan mekanisme kontrol antara pihak-pihak yang terlibat didalam manajemen bank.

2.2.1. HUBUNGAN PRINSIPAL-AGEN

Pemilik bank (prinsipal) menggunakan pihak manajemen (agen) dalam mengelola bank. Penyerahan tanggung jawab dari pemilik bank kepada pihak manajemen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses untuk menentukan struktur manajemen bank sangat hati-hati. Proses ini tidak hanya ditentukan oleh pemilik, tetapi juga ditentukan oleh otoritas moneter BI.

Setelah pemilik bank menentukan struktur manajemen, BI akan melakukan uji kemampuan dan kepantasan (*fit and proper test*) terhadap manajemen tersebut.

Dalam hubungan keagenan pada perusahaan perbankan, prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi bank. Agen berkewajiban mengelola bank untuk meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai bank yang tercermin pada harga sahamnya. Sebagai imbalan, agen akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai macam kompensasi lainnya.

Dalam prakteknya, tidak sedikit agen yang cenderung memanfaatkan dana dari prinsipal untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin bagi pihaknya. Perilaku ini disebut sebagai *risk adverse*, yang berarti tidak suka menanggung resiko (Taswan, 2010). Bank yang ukuran perusahaannya semakin besar akan besar pula kemungkinan terkena *agency problem*. Adanya *agency problem* akan memunculkan *agency cost*. Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan biaya keagenan (*agency cost*) sebagai jumlah dari pengeluaran untuk pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal, pengeluaran karena penjaminan oleh agen atau *insiders*, serta pengeluaran karena *residual loss* atau biaya yang timbul karena prinsipal merasa kehilangan kenyamanan sebagai akibat adanya penyimpangan antara harapan dengan keputusan agen.

2.2.2. HUBUNGAN AGEN-KREDITUR/DEBITUR

Kontrol terhadap perusahaan perbankan tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham, namun juga oleh kreditor atau investor atau deposan. Dalam istilah perbankan hal ini disebut *market discipline*, sedangkan dalam perspektif

keagenan dapat dijelaskan melalui hubungan keagenan-utang. Penggunaan utang oleh bank akan menjadi alat insentif bagi manajer untuk bekerja lebih hati-hati guna menghindari ancaman risiko kebangkrutan. Namun, penggunaan utang atau dana masyarakat dapat menimbulkan masalah keagenan ketika pemegang saham dan manajer mengambil keputusan-keputusan investasi yang berisiko tinggi.

2.2.3. HUBUNGAN AGEN-REGULATOR

Adanya peran BI sebagai regulator menyebabkan hubungan keagenan pada perusahaan perbankan menjadi lebih kompleks. Manajer cenderung lebih memaksimalkan *utility* daripada *profit* mengingat adanya peran regulator. Regulator sebagai pihak eksternal manajemen bank ikut mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen bank. Oleh karena itu, pemegang saham dan manajer pun akan memperhatikan kepatuhan regulasi. Regulasi mengarahkan pihak manajemen untuk mengelola bank secara hati-hati (*prudent*). Prinsip hati-hati ini mengindikasikan adanya pencegahan terhadap *moral hazard* (Taswan, 2010).

Moral hazard adalah jenis dari asimetri informasi. *Moral hazard* dapat terjadi jika satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak lain tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan-perusahaan besar, termasuk di perusahaan perbankan (Rahmawati *et al.* 2007).

Perusahaan perbankan sangat rawan akan *moral hazard* atau penyimpangan moral karena terdapat kepentingan-kepentingan masing-masing pihak (*stakeholder*), yaitu kepentingan pemegang saham yang dapat mengorbankan pihak lain untuk keuntungan dirinya, kepentingan manajemen yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham, kepentingan debitur yang dapat mengorbankan kepentingan bank. Terdapat 4 (empat) masalah *moral hazard* pada lembaga perbankan yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) *moral hazard* debitur terhadap bank, (2) *moral hazard* manajer bank terhadap pemegang saham, (3) *moral hazard* pemegang saham terhadap depositan, dan (4) *moral hazard* bank atau shareholder terhadap penjamin simpanan (Taswan, 2010).

2.3. PENDEKATAN KONTROL REGULATOR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN

2.3.1. PENGATURAN DAN PENGAWASAN REGULATOR

Menurut Taswan (2010) bank beroperasi di bawah regulasi yang secara substansial berbeda dengan perusahaan nonbank, dan ini dapat mempengaruhi sifat dan efektifitas mekanisme kontrol. BI sebagai Bank Sentral dan regulator bagi bank-bank umum komersial memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan memberikan ijin, yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perijinan dan pendirian bank.

- 2) Kewenangan untuk mengatur, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat.
- 3) Kewenangan untuk mengawasi, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa pemeriksaan umum dan khusus untuk memantau kepatuhan bank terhadap peraturan dan mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat. Pengawasan tidak langsung berupa pemantauan laporan keuangan dan informasi lainnya.
- 4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi apabila bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

2.3.2. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Dalam melakukan pendekatan kontrol pada perusahaan perbankan, regulator (BI) menekankan transparansi kondisi keuangan pada bank umum komersial. BI mewajibkan bank untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang relevan untuk industri perbankan, PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia), dan pedoman lain yang diterbitkan oleh BI. Bank diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan kepada BI dan dipublikasikan untuk umum. Setiap triwulan, bank diwajibkan menyusun laporan mengenai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana.

Dalam menyusun laporan keuangannya, perusahaan perbankan wajib menilai kualitas kredit. Pengungkapan informasi kualitas kredit akan menunjukkan potensi perolehan pendapatan perusahaan perbankan di masa yang akan datang. Selain itu, pengungkapan informasi kualitas kredit juga digunakan sebagai dasar dalam pembentukan cadangan kerugian piutang.

2.4. ASIMETRI INFORMASI

Asimetri informasi adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. *Agency theory* mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Ketika asimetri tinggi, *stakeholder* tidak memiliki sumberdaya yang cukup atau pun akses informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajer. Hal ini menyebabkan terciptanya kesempatan atas praktik manajemen laba.

Adanya asimetri informasi di perusahaan perbankan disebabkan karena perbankan memiliki struktur modal yang kompleks. Bank pada umumnya beroperasi dengan modal yang sangat rendah dibandingkan dengan hutang atau kewajiban kepada pihak eksternal. Operasi bank sebagian besar didanai oleh dana masyarakat atau dari kreditur. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan ini, maka menurut Ciancanelli dan Gonzales (2000) asimetri di perusahaan perbankan muncul karena terdapat paling sedikitnya tiga hubungan

keagenan, yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, dan (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. Dalam setiap hubungan tersebut pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain.

2.5. MANAJEMEN LABA

2.5.1. DEFINISI DAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Manajemen laba merupakan suatu proses yang disengaja untuk memilih metode akuntansi tetapi tidak menyalahi batasan Standar Akuntansi Keuangan yang bertujuan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Menurut Scott (2003), manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat oportunistik (manajemen melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya) (Taswan, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Healy dan Wahlen (1998) mengungkapkan bahwa manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan untuk menyesatkan beberapa *stakeholder* mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi *contactual outcomes* yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan perbankan dihitung dengan menggunakan model empiris manajemen laba berdasarkan akrual spesifik. Dalam model *loan loss provision* (Beaver dan Engel 1996), penyisihan kerugian piutang yang diestimasi sebagai sisa regresi biaya dari kerugian penghapusan piutang digunakan sebagai proksi manajemen laba. Penelitian McNulty (2005) menggunakan model *loan loss provision* untuk perhitungan manajemen laba.

2.5.2. MOTIVASI MANAJEMEN LABA

Manajemen laba dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih rendah. Berikut ini merupakan motivasi-motivasi dilakukannya manajemen laba:

a. Rencana bonus atau *bonus purposes*

Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

b. Motivasi politik atau *politic motivations*

Perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba yang diumumkan kepada publik. Hal ini dikarenakan adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

c. Motivasi pajak atau *taxation motivations*

Manajer termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. Berbagai metoda akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak.

d. Pergantian *Chief Executive Officer* (CEO)

Seorang CEO yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya.

e. *Initial Public Offering* (IPO)

Manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan bertujuan untuk mempengaruhi pasar, yaitu persepsi investor. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan pembuatan laporan keuangan dengan cenderung mempertinggi laba. Tindakan mempertinggi laba dilakukan dalam usaha memaksimalkan penerimaan (*proceeds*) dari penawaran perdana saham perusahaan tersebut.

f. Kepentingan pemberian informasi kepada investor

Investor memiliki kecenderungan untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang dan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang (Scott, 2003). Oleh karena itu informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor.

2.5.3. BENTUK MANAJEMEN LABA

Terdapat beberapa bentuk atau pola manajemen laba menurut Scott (2003), yaitu:

a. *Taking a bath*

Taking a bath terjadi pada periode stres atau reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer merasa dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya mendatang serta melakukan *clear the decks*, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

b. *Income minimization*

Income minimization merupakan bentuk manajemen laba yang hampir sama dengan *taking a bath*, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, serta mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan.

c. *Income maximization*

Income maximization merupakan bentuk manajemen laba yang bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian hutang juga cenderung untuk memaksimalkan laba.

d. *Income smoothing*

Income smoothing merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering dilakukan dan paling populer. Lewat *income smoothing* manajer menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

2.6. PENGERTIAN PENGUNGKAPAN INFORMASI (*DISCLOSURE*)

Menurut Suwardjono (2008), secara konseptual, pengungkapan informasi merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan informasi merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh pernyataan keuangan. Pengungkapan informasi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

a. Manfaat bagi perusahaan

Manfaat bagi perusahaan, yaitu dapat diperolehnya biaya modal yang lebih rendah. Pengungkapan informasi memberikan jaminan bahwa laporan keuangan menjadi lebih lengkap dan akurat sehingga resiko kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan tersebut menjadi berkurang. Dengan demikian, investor dan

kreditur bersedia membeli sekuritas dengan harga tinggi. Akibat dari harga sekuritas yang tinggi tersebut adalah biaya modal perusahaan menjadi rendah.

b. Manfaat bagi investor

Manfaat bagi investor adalah berkurangnya resiko informasi yang akan mengurangi kesalahan pembuatan keputusan investasi. Dengan demikian, investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap. Hal ini akan membuat sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor dan harganya akan naik. Kenaikan harga saham ini pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran investor.

c. Manfaat bagi kepentingan nasional

Manfaat bagi kepentingan nasional diperoleh dari adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya resiko informasi yang dihadapi investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja menjadi lebih luas, dan pada akhirnya standar kehidupan akan meningkat pula. Karena berkurangnya resiko informasi yang dihadapi investor, maka pasar modal menjadi lebih likuid. Likuiditas pasar modal ini diperlukan oleh perekonomian nasional, karena dapat membantu alokasi modal secara efektif.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) pengungkapan wajib (*mandatory*

disclosure) dan (2) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan dan bersifat wajibkan sesuai peraturan. Peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-38/PM/1996 yang selanjutnya diubah melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-134/BL/2006. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan ini merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek *et al.* 1995).

Menurut Suripto dan Baridwan (1999), pengungkapan sukarela yang disajikan oleh manajemen pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tersebut lebih besar dari biayanya. Biaya pengungkapan informasi oleh perusahaan dapat digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya pengungkapan langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan menyajikan informasi. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan, biaya pemrosesan, biaya pengauditan (bila diperlukan) dan biaya penyebaran informasi. Biaya pengungkapan tidak langsung adalah biaya-biaya yang timbul akibat diungkapkannya dan atau tidak diungkapkannya informasi. Biaya-biaya tersebut

meliputi biaya litigasi dan *proprietary cost* (biaya *competitive disadvantage* dan biaya politik).

Biaya litigasi muncul karena pengungkapan informasi yang tidak mencukupi atau menyesatkan. Pengungkapan informasi dapat menimbulkan kerugian apabila informasi yang diungkapkan justru akan melemahkan daya saing perusahaan karena informasi tersebut digunakan oleh pesaing untuk memperkuat daya saing mereka. Biaya politik terjadi apabila pengungkapan perusahaan memicu regulasi oleh pemerintah (Suripto dan Baridwan 1999).

2.6.1. LUAS PENGUNGKAPAN

Terdapat tiga konsep pengungkapan, yaitu:

a. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)

Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c. *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Scott (1997) menunjukkan dua manfaat

pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik, dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.

Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki pengaruh pengungkapan informasi (*disclosure*) pada manajemen laba hanya terbatas dalam pengungkapan sukarela saja. Hal ini dilakukan dengan alasan: (1) pemerintah Indonesia melalui keputusan ketua Bapepam-LK telah menetapkan aturan mengenai pengungkapan wajib, dan (2) pemerintah Indonesia sudah menunjuk Bapepam-LK sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut maka dalam penelitian ini diasumsikan semua perusahaan mematuhi aturan mengenai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

2.7. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen memberikan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Namun, praktek manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi menyesatkan. Manajemen laba pada perusahaan perbankan muncul karena adanya asimetri informasi dan pemilihan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dasar akrual dipilih dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan perbankan karena dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan pedoman yang ditetapkan oleh BI.

Dengan adanya peningkatan penyajian pengungkapan sukarela, diharapkan asimetri informasi dapat berkurang sehingga manajemen laba dapat ditekan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.* (2007) menunjukkan bahwa asimetri informasi dalam perusahaan perbankan berpengaruh secara positif signifikan pada manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Halim *et al.* (2005) mengenai pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur, menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan negatif pada manajemen laba. Dengan demikian peneliti menduga terdapat pengaruh luas pengungkapan sukarela pada manajemen laba perusahaan perbankan. Penyajian luas pengungkapan sukarela yang lebih tinggi dapat mengurangi asimetri informasi, sehingga dapat memperkecil manajemen laba di perusahaan perbankan.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H_a : Luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif pada manajemen laba perusahaan perbankan di Indonesia.